

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

C.S.T.Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soemitro Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Nagari

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2003

Penjelasan Umum UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Diktum *menimbang* butir c UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan.

Permendagri No.35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

C. WEBSITE

Soepomo, *Pemahaman Keuangan Negara*, <http://www.djkn.depkeu.go.id/> di
unduh pada tanggal 2 Oktober 2016

www.nagaridanperkembangannya.com

